

## BAB II

### SEJARAH PSSI DAN PRAKTIK NATURALISASI DALAM SEPAK BOLA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

#### 2.1. Sejarah PSSI

PSSI bertindak sebagai badan pengatur nasional yang membawahi seluruh ekosistem sepak bola di Indonesia, termasuk variannya seperti futsal dan sepak bola pantai. Eksistensinya bersifat tunggal dan memiliki legalitas hukum dalam berafiliasi dengan federasi internasional (FIFA), regional Asia (AFC), maupun Asia Tenggara (AFF). Dengan demikian, PSSI memegang peran sentral sebagai otoritas yang mengurus kebijakan serta pelaksanaan kompetisi sepak bola secara komprehensif di tanah air. Eksistensi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berakar kuat pada dinamika perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di awal abad ke-20. Pada masa itu, sepak bola bertransformasi dari sekadar olahraga peninggalan penjajah menjadi instrumen artikulasi identitas nasional bagi kaum pribumi. Dorongan untuk melepaskan diri dari pengaruh kuat *Nederlandsch Indische Voetbal Bond* (NIVB) memicu lahirnya organisasi sepak bola mandiri. Tepat pada 19 April 1930 di Yogyakarta, Ir. Soeratin Sosrosoegondo bersama tokoh pergerakan lainnya mendeklarasikan Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (Erwin Dwi Ardiyanto & Putri Agus Wijayati, 2023). Pembentukan ini merupakan sikap tegas klub-klub pribumi dalam menentang praktik diskriminasi rasial di lapangan hijau. Dengan

demikian, PSSI hadir bukan hanya untuk kepentingan teknis olahraga, melainkan sebagai manifestasi politik untuk menyatukan semangat kebangsaan melalui medium sportivitas.

Lahirnya Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia bukan sekadar respons terhadap diskriminasi kolonial, melainkan manifestasi dari kebutuhan mendesak untuk memayungi kepentingan klub-klub pribumi yang selama ini teralienasi dari struktur formal. Di era Hindia Belanda, dominasi komunitas Eropa dalam tubuh *Nederlandsch Indische Voetbal Bond* (NIVB) dan *Nederlandsch Indische Voetbal Unie* (NIVU) telah menciptakan barikade struktural yang memarginalkan pesepak bola bumiputera. Tanpa akses terhadap fasilitas mumpuni dan kompetisi yang terintegrasi, klub-klub lokal berada dalam posisi yang timpang.

Realitas diskriminatif inilah yang memicu kesadaran kolektif di antara para tokoh pergerakan bahwa kedaulatan sepak bola harus direbut melalui organisasi yang mandiri dan lepas dari bayang-bayang otoritas kolonial. penggerak di balik visi besar ini adalah Soeratin Sosrosoegondo. Sebagai seorang intelektual lulusan Jerman, Soeratin mampu mengombinasikan latar belakang teknokratisnya dengan semangat nasionalisme yang progresif. Ia menyadari sepenuhnya bahwa organisasi olahraga modern merupakan instrumen strategis yang melampaui sekadar aktivitas fisik. Sepak bola adalah medium mobilisasi massa yang mampu mengartikulasikan perlawanan simbolik terhadap hegemoni kekuasaan Belanda. Baginya, lapangan hijau adalah arena untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola dirinya sendiri secara profesional dan berdaulat.

Momentum bersejarah pada tahun 1930 menjadi tonggak berdirinya Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia, yang bertujuan menyatukan serpihan-serpihan kekuatan klub pribumi di seantero Nusantara ke dalam satu sistem kompetisi nasional yang independen. Upaya ini memiliki dimensi simbolik yang mendalam sebagai bagian dari konstruksi identitas nasional. Seiring menguatnya semangat kebangsaan, perubahan sistem penamaan menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pun dilakukan. Meski mengalami penyesuaian, esensi fundamental organisasi tetap konsisten, menjadi wadah pemersatu sekaligus simbol eksistensi bangsa yang menolak subordinasi. Pascakemerdekaan 1945, PSSI mengalami metamorfosis peran yang signifikan. Jika sebelumnya organisasi ini berfungsi sebagai garda perlawanan terhadap kolonialisme, maka peran tersebut merujuk pada fungsi PSSI sebagai organisasi alternatif yang memberikan ruang otonomi bagi masyarakat pribumi untuk mengorganisasi aktivitas sepak bola secara mandiri di luar kontrol institusi kolonial.

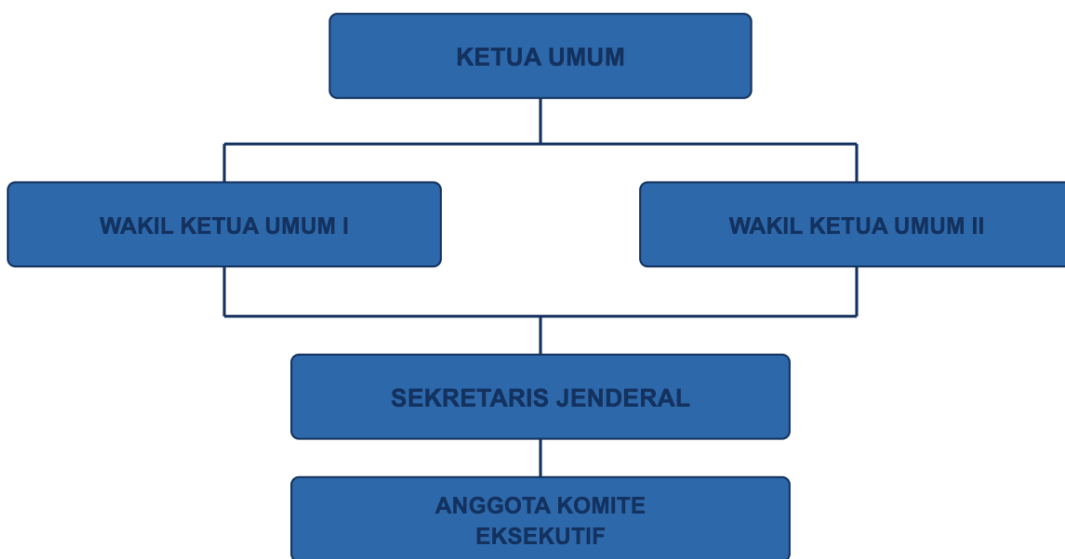
Pada masa Hindia Belanda, organisasi sepak bola seperti Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB) dan Nederlandsch Indische Voetbal Unie (NIVU) didominasi oleh komunitas Eropa dan menerapkan struktur yang eksklusif, di mana klub-klub pribumi tidak memperoleh akses yang setara terhadap kompetisi resmi, fasilitas, maupun legitimasi organisasi. Kondisi tersebut mencerminkan adanya sistem diskriminasi rasial yang menempatkan masyarakat pribumi pada posisi subordinat dalam struktur olahraga kolonial. Dalam konteks ini, pembentukan Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia merupakan bentuk resistensi institusional terhadap dominasi kolonial, karena organisasi ini memungkinkan klub-klub pribumi untuk

membangun sistem organisasi dan kompetisi sendiri yang independen. Perlawanan yang dimaksud tidak bersifat konfrontatif secara fisik atau militer, melainkan diwujudkan melalui pembentukan institusi modern yang merepresentasikan kapasitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Dengan membentuk organisasi sepak bola sendiri, masyarakat pribumi menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola organisasi secara mandiri tanpa bergantung pada struktur kolonial, sekaligus menolak konstruksi inferioritas yang dilekatkan oleh sistem kolonial terhadap bangsa terjajah. Selain itu, sepak bola juga berfungsi sebagai medium untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat identitas nasional di tengah situasi kolonial.

Melalui koordinasi antar perkumpulan sepak bola pribumi dari berbagai wilayah, PSSI berperan dalam menciptakan jaringan sosial yang memperkuat solidaritas dan rasa persatuan sebagai satu bangsa. Dalam hal ini, sepak bola tidak hanya berperan sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai instrumen simbolik dalam proses pembentukan identitas nasional dan upaya untuk merebut ruang otonomi dari dominasi kolonial. Dengan demikian, fungsi PSSI sebagai garda perlawanan terhadap kolonialisme dapat dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun kedaulatan organisasi dan menegaskan eksistensi bangsa Indonesia di tengah sistem kolonial yang diskriminatif. Seiring dengan berakhirnya masa kolonial dan diperolehnya kemerdekaan Indonesia, peran PSSI kemudian mengalami transformasi dari instrumen perlawanan simbolik menjadi institusi resmi yang merepresentasikan Indonesia dalam sistem sepak bola nasional dan internasional. Meskipun demikian, akar historis pembentukannya sebagai bagian dari gerakan

nasionalisme tetap menjadi fondasi penting dalam memahami posisi dan peran PSSI dalam perkembangan sepak bola Indonesia hingga saat ini.

## 2.2. Struktur Organisasi dan Kewenangan PSSI



**Gambar 2.1. Bagan Struktur PSSI**

**Sumber : Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), 2023.**

Struktur organisasi PSSI dipimpin oleh Ketua Umum sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam menjalankan arah dan kebijakan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Umum didampingi oleh dua Wakil Ketua Umum yang berperan membantu koordinasi serta pelaksanaan program kerja organisasi. Pada tingkat administratif, Sekretaris Jenderal bertanggung jawab mengelola operasional

harian organisasi, termasuk koordinasi antarbidang dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Di bawah Sekretaris Jenderal terdapat Anggota Komite Eksekutif (Exco) yang berfungsi sebagai unsur pelaksana dan pengambil keputusan strategis dalam berbagai aspek pengelolaan sepak bola nasional. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan mendukung efektivitas tata kelola organisasi PSSI sesuai dengan prinsip tata kelola federasi sepak bola modern (PSSI, 2023).

2019–2025 menandai sebuah fase krusial dalam sejarah sepak bola modern Indonesia, di mana terjadi eskalasi kebijakan yang secara fundamental mengubah wajah tim nasional melalui intensifikasi naturalisasi pemain diaspora. Fase ini bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan representasi dari pergeseran diskursus publik yang semakin melegitimasi penggunaan elemen-elemen eksternal sebagai tolok ukur kemajuan. Sejak tahun 2019, muncul sebuah konsolidasi strategi yang menempatkan pemanfaatan pemain keturunan dan pelatih asing sebagai instrumen utama dalam mengejar ketertinggalan prestasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya orientasi Eurosentris yang sangat kuat, di mana standar profesionalisme dan kualitas teknis secara mutlak dirujuk pada sistem sepak bola Eropa. Titik balik dari kecenderungan ini termanifestasi secara nyata melalui penunjukan Shin Tae-yong pada akhir tahun 2019. Di bawah kendali teknisnya, terjadi pergeseran paradigma dalam pola rekrutmen, seleksi tidak lagi berpusat pada talenta yang lahir dari rahim kompetisi domestik, melainkan secara agresif menasar pemain-pemain hasil didikan sistem Eropa, khususnya Belanda.

Dalam kacamata post-kolonial, langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk mimikri institusional, di mana otoritas sepak bola nasional berupaya mereplikasi keunggulan "Pusat" (Barat) melalui pengadopsian sumber daya manusianya. Adanya asumsi bahwa pemain hasil didikan Eropa secara inheren lebih unggul dibanding produk lokal mencerminkan residu inferioritas yang memandang kapasitas domestik belum mampu mencapai derajat "kemajuan" tanpa bantuan elemen dari luar (Sulistiyono, 2012). Namun, ketergantungan terhadap figur otoritas asing ini sebenarnya memiliki akar historis yang panjang dan repetitif dalam tubuh PSSI. Sejak awal milenium, Indonesia secara konsisten terjebak dalam pola penunjukan pelatih dari berbagai latar belakang negara, mulai dari Peter Withe (Inggris), Alfred Riedl (Austria), Luis Milla (Spanyol), hingga Simon McMenemy (Skotlandia). Keberlanjutan tren ini menunjukkan adanya struktur berpikir yang terkolonisasi, di mana terdapat kepercayaan buta bahwa latar belakang internasional seorang pelatih secara otomatis membawa solusi bagi problematika sepak bola nasional. Hal ini melanggengkan posisi subaltern sepak bola Indonesia yang seolah-olah selalu membutuhkan "juru selamat" asing untuk mendefinisikan arah pembangunannya.

Memasuki era kepemimpinan PSSI di bawah Erick Thohir sejak 2023, kebijakan naturalisasi mencapai puncaknya melalui proses yang lebih terinstitusionalisasi dan sistemik. Percepatan administratif yang didukung penuh oleh legitimasi politik negara menunjukkan bahwa naturalisasi bukan lagi sekadar solusi jangka pendek (ad-hoc), melainkan bagian dari desain besar strategi nasional. Meski terlihat sebagai langkah

modernisasi, secara diskursif hal ini mempertegas adanya tarikan antara ambisi global dan pengabaian terhadap kedaulatan proses pembinaan internal. Integrasi pemain diaspora dalam agenda-agenda besar seperti Kualifikasi Piala Dunia mencerminkan sebuah upaya melompati proses evolusi sepak bola domestik demi mencapai pengakuan internasional yang instan. Secara keseluruhan, rentang waktu 2019–2025 memperlihatkan bagaimana pembangunan sepak bola kontemporer Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pada standar dan sistem eksternal. Sinergi antara penggunaan pelatih asing dan pemain naturalisasi menegaskan sebuah pola pembangunan yang bersifat *top-down* dan berbasis pada rujukan luar negeri. Hal ini menjadi paradoks identitas bagi sepak bola nasional: di satu sisi ia berusaha mengejar martabat di kancah global, namun di sisi lain, strategi yang digunakan justru memperkuat narasi inferioritas terhadap kapasitas diri sendiri di hadapan supremasi sepak bola global (Sulistiyono, 2012).

Lingkup Otoritas dan Yurisdiksi Nasional Secara legal, PSSI memegang mandat mutlak sebagai regulator sepak bola di wilayah NKRI. Kewenangan ini mencakup pengembangan olahraga secara berkelanjutan, penyusunan aturan yang mengikat bagi seluruh anggota, hingga penyelenggaraan seluruh strata kompetisi nasional. PSSI juga memiliki hak prerogatif dalam membentuk serta mengelola tim nasional untuk berbagai kelompok umur dan gender, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh pertandingan sepak bola yang berlangsung di bawah yurisdiksinya. Kewajiban Internasional dan Otonomi Kebijakan Dalam lanskap

global, PSSI memposisikan diri sebagai entitas yang patuh terhadap ketentuan FIFA, AFC, dan AFF, terutama dalam menjaga integritas olahraga dari ancaman manipulasi skor, kekerasan, maupun rasisme. Meskipun terikat dengan aturan internasional, PSSI tetap memiliki kedaulatan dalam merumuskan kebijakan domestik seperti prosedur naturalisasi pemain sepanjang sejalan dengan hukum nasional. Kedudukan ini menjadikan PSSI sebagai aktor sentral yang menyelaraskan kepentingan negara, industri olahraga, dan aspirasi publik dalam satu kebijakan nasional yang terpadu (1)Abrar, 2)Syahrudin, 3)Alvan Kharis Aneboa, 2024).

Peran dan fungsi PSSI dalam pengelolaan tim nasional, otoritas pembinaan dan manajemen teknis sebagai induk organisasi, PSSI memegang kendali penuh atas eksistensi tim nasional Indonesia di seluruh jenjang usia dan kategori, mulai dari skuad senior hingga tim nasional putri. Mandat ini mencakup tanggung jawab komprehensif yang meliputi penentuan jajaran pelatih, seleksi pemain, hingga penyusunan agenda strategis untuk turnamen resmi di bawah naungan FIFA, AFC, dan AFF. Dalam naskah statuta organisasi, upaya membangun tim nasional yang kompetitif di level internasional ditegaskan bukan sekadar target teknis, melainkan tujuan fundamental federasi. Standardisasi Filosofi dan Sinkronisasi Kompetisi Pada tataran teknis, PSSI berfungsi sebagai poros yang merumuskan filosofi permainan nasional dan kurikulum pembinaan terpadu. Melalui departemen tim nasional dan komite teknik, federasi merancang peta jalan jangka pendek maupun panjang termasuk manajemen pemusatan latihan (*training camp*) dan pemantauan performa

pemain di level klub. Salah satu tantangan institusional yang dikelola PSSI adalah sinkronisasi kalender FIFA dengan kompetisi domestik, guna menjamin keseimbangan kepentingan antara klub sebagai pemilik pemain dan tim nasional sebagai representasi negara (Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2024). Dukungan Manajerial dan Diplomasi Internasional Aspek administratif dan logistik menjadi pilar penting lainnya, di mana PSSI bertanggung jawab atas pembiayaan aktivitas tim nasional, penyediaan fasilitas, hingga operasional pertandingan internasional. Meski belakangan ini terdapat upaya profesionalisasi melalui badan usaha milik federasi, kendali strategis tetap berada di bawah otoritas PSSI. Selain itu, dalam ranah diplomasi olahraga, PSSI bertindak sebagai penghubung resmi dengan entitas sepak bola global untuk memastikan pemenuhan regulasi dan lisensi pemain, sekaligus menjadikan tim nasional sebagai instrumen pencitraan Indonesia di mata dunia.

Naturalisasi dan Konstruksi Identitas Nasional Relevansi peran PSSI dalam penelitian ini tampak pada otoritasnya dalam menentukan strategi rekrutmen pemain, termasuk melalui kebijakan naturalisasi dan pemanfaatan pemain diaspora. Kebijakan ini tidak hanya bersifat teknis-taktis di bawah arahan pelatih, namun merupakan cerminan dari pilihan politis federasi dalam menyusun komposisi tim. Proses ini menjadi ruang di mana PSSI mendefinisikan kriteria siapa yang berhak "mewakili bangsa" di lapangan hijau. Dengan demikian, tata kelola tim nasional oleh PSSI

menjadi arena krusial untuk membedah dinamika kekuasaan, politik identitas, serta manifestasi kompleksitas inferioritas pascakolonial (Tashya Maula Ardila, 2024).

### **2.3. Naturalisasi dalam Sepak Bola Internasional**

Sinergi Regulasi Nasional dan Global Secara yuridis, naturalisasi dipahami sebagai prosedur hukum yang memungkinkan seorang warga negara asing memperoleh status kewarganegaraan baru setelah memenuhi kriteria legalitas yang ditetapkan oleh suatu negara. Namun, dalam ekosistem sepak bola, fenomena ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan persinggungan antara dua otoritas hukum yang berbeda, konstitusi negara terkait kedaulatan warga negara dan regulasi kelayakan (*eligibility*) pemain yang ditetapkan oleh FIFA. Harmonisasi kedua rezim ini menjadi prasyarat mutlak agar seorang atlet memiliki legitimasi untuk merepresentasikan tim nasional di panggung internasional.

Dalam konteks ini, kewarganegaraan bertransformasi menjadi aset strategis yang dikelola untuk kepentingan *branding* negara, pencapaian target kompetitif, serta penguatan posisi negara dalam industri sepak bola global yang bernilai ekonomi tinggi (Jansen, J. et al, n.d.). Otoritas FIFA dalam menentukan legalitas seorang pemain untuk mewakili tim nasional berpijak pada *Regulations Governing the Application of the Statutes*, khususnya pada klausul mengenai "Eligibility to play for representative teams". Regulasi ini menegaskan bahwa kepemilikan paspor suatu negara tidak serta-merta memberikan hak bermain di level internasional, diperlukan

adanya bukti "hubungan nyata" (*genuine link*) antara sang atlet dengan negara yang bersangkutan. Secara teknis, ikatan ini divalidasi melalui tiga jalur utama, tempat kelahiran atlet, garis keturunan (orang tua atau kakek-nenek), serta durasi domisili di wilayah negara tersebut.

Bagi pemain yang menempuh jalur naturalisasi murni tanpa ikatan genealogis (garis keturunan), FIFA menerapkan aturan masa tinggal (*residency*) yang ketat. Berdasarkan revisi terbaru, pemain yang bersangkutan wajib bermukim secara berkelanjutan selama minimal lima tahun setelah menginjak usia 18 tahun di negara baru tersebut. Regulasi *residency* ini memicu perdebatan akademis yang luas terkait strategi federasi nasional (Schulting, Jorn Erik, 2019). Dalam kerangka inilah, kebijakan naturalisasi yang diambil PSSI merupakan bentuk navigasi strategis di dalam ruang sempit yang disediakan oleh regulasi FIFA, sekaligus menjadi cermin bagi pertarungan wacana politik identitas di ruang domestik.

Dalam lanskap sepak bola internasional, fenomena naturalisasi menunjukkan pola distribusi yang tidak seimbang. Negara-negara berkembang cenderung menjadi "konsumen" aktif yang menaturalisasi pemain dari sistem sepak bola Eropa atau Amerika Selatan. Sebaliknya, negara-negara maju sangat selektif dan jarang melakukan hal serupa terhadap pemain dari negara berkembang. Pola asimetris ini mencerminkan adanya hierarki global yang menempatkan Eropa Barat dan sebagian Amerika Selatan sebagai "pusat" produksi talenta, sementara negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin diposisikan sebagai "pasar" yang bergantung pada impor

pemain demi mendongkrak kualitas domestik secara instan. Strategi di negara berkembang sering kali berfokus pada pemain diaspora yang memiliki kaitan genealogis namun besar di Eropa, atau bahkan pemain murni tanpa ikatan darah yang memiliki keunggulan teknis. Studi Schulting (2019) mengilustrasikan bagaimana Qatar dan negara Asia Barat lainnya menggunakan *talent migration* dari Amerika Selatan dan Afrika sebagai akselerator prestasi. Fenomena serupa terlihat di Asia Tenggara, seperti Filipina, yang secara konsisten merekrut pemain hasil didikan akademi Eropa dan Amerika Utara. Orientasi ini menunjukkan adanya pengakuan implisit terhadap "standar" profesionalisme sepak bola Barat sebagai tolok ukur keunggulan global (Schulting, Jorn Erik, 2019).

Berbeda dengan pola di negara berkembang, arus naturalisasi di Eropa Barat biasanya berlangsung secara organik melalui jalur migrasi jangka panjang atau pembinaan sejak usia dini di akademi elit lokal. Meskipun terdapat kasus khusus seperti Diego Costa, mayoritas pemain asal negara berkembang yang membela tim nasional Eropa telah melewati proses integrasi sosial dan residensi yang mendalam. Di sini, kebutuhan akan "impor instan" sangat rendah karena sistem domestik negara maju telah mapan, sehingga mereka tidak merasa perlu melakukan perburuan pemain asing secara agresif yang berisiko mengganggu kohesi identitas nasional. Kontras antara kedua pola ini merupakan manifestasi dari reproduksi relasi kuasa antara "pusat" dan "pinggiran" dalam sepak bola. Liga-liga top Eropa berfungsi sebagai

pusat akumulasi modal dan teknologi sepak bola, yang memberikan nilai simbolik tinggi bagi pemain yang lahir atau berkarier di sana.

Dari perspektif pascakolonial, kebijakan naturalisasi di negara berkembang dapat dibaca sebagai bentuk afirmasi terhadap superioritas sistem Barat. Dengan mengimpor pemain dari "pusat", negara-negara pinggiran secara tidak langsung melanggengkan hierarki global, di mana pengakuan terhadap kualitas sepak bola tetap berporos pada standar kolonial lama yang telah bermutasi menjadi standar industri sepak bola modern (Ibnatia Hasna Fawwaz, 2024). Warisan Sejarah dan Dinamika Sepak Bola Pasca-Kemerdekaan Sebagai negara yang melepaskan diri dari kolonialisme Prancis pada 1962, Aljazair merupakan representasi nyata bagaimana kemerdekaan politik tidak serta-merta memutus relasi historis yang kompleks.

Dalam arena sepak bola, hubungan ini bermanifestasi melalui ketergantungan Tim Nasional Aljazair terhadap para pemain diaspora yang lahir dan tumbuh di Prancis. Fenomena ini menciptakan paradoks identitas secara politik mereka adalah bangsa yang berdaulat, namun secara teknis sepak bola, mereka tetap beroperasi dalam orbit sistem pembinaan mantan penjajahnya. Pola Rekrutmen dan Standarisasi "Pusat" Kecenderungan Aljazair untuk memprioritaskan pemain hasil didikan akademi Prancis dan liga-liga elit Eropa mengonfirmasi adanya persepsi hierarki kualitas. Talenta yang ditempa dalam ekosistem sepak bola Prancis dipandang memiliki standar profesionalisme dan kematangan taktis yang melampaui produk domestik. Selain itu, keterlibatan pelatih asal Eropa dalam berbagai periode

kepemimpinan tim nasional semakin mempertegas bahwa visi teknis dan metodologi pelatihan Aljazair masih berkiblat pada standar Barat. Retensi Relasi Struktural Meskipun pemanggilan pemain-pemain ini memiliki landasan hukum yang sah melalui prinsip *jus sanguinis* (garis keturunan), fenomena ini menyingkap lapisan masalah yang lebih dalam dalam perspektif pascakolonial.

Ketergantungan yang sistemik terhadap diaspora Eropa memperlihatkan bahwa Aljazair masih terjebak dalam relasi struktural yang belum sepenuhnya mandiri dari warisan kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sepak bola di negara bekas koloni sering kali masih diposisikan sebagai "perpanjangan" dari sistem negara pusat (*metropole*), di mana pengakuan atas identitas nasional justru diraih melalui pemanfaatan sumber daya yang diproduksi oleh struktur kolonial masa lalu (Sami Everett, 2022).

Kontinuitas Pengaruh Protektorat dalam Ekosistem Sepak Bola Sebagai negara yang secara historis pernah berada di bawah pengaruh protektorat Prancis dan Spanyol, Maroko menunjukkan pola ketergantungan yang signifikan terhadap sistem sepak bola Eropa. Fenomena ini terlihat jelas dalam komposisi skuad tim nasional mereka di berbagai ajang prestisius, seperti Piala Dunia, di mana mayoritas pemainnya merupakan individu diaspora yang lahir, tumbuh, dan dibina secara profesional di negara-negara seperti Belanda, Prancis, maupun Spanyol. Hal ini merefleksikan bagaimana sejarah migrasi pascakolonial telah menciptakan ruang bagi

Maroko untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang berkembang di pusat-pusat sepak bola dunia.

Karakteristik Strategi dan Hegemoni Infrastruktur Barat Kebijakan sepak bola Maroko dicirikan oleh fokus yang intens pada rekrutmen pemain keturunan yang memiliki keunggulan teknis berkat didikan infrastruktur Eropa. Meskipun Maroko secara paralel melakukan investasi pada akademi domestik, kontribusi pemain diaspora tetap menjadi determinan utama dalam pencapaian prestasi mereka di level internasional. Penggunaan jasa pelatih asing dari Eropa juga menjadi bagian dari strategi untuk menyelaraskan filosofi permainan nasional dengan standar kompetisi global yang dianggap lebih unggul. Identitas Transnasional dan Ketergantungan Teknis Dalam perspektif pascakolonial, pola yang ditunjukkan Maroko menggambarkan sebuah dilema identitas transnasional.

Di satu sisi, pemanfaatan diaspora adalah cara cerdas untuk mengejar ketertinggalan prestasi; namun di sisi lain, hal ini menegaskan ketergantungan teknis terhadap sistem yang pernah menjadi "penguasa" mereka. Keberhasilan Maroko sering kali dibaca sebagai keberhasilan mengelola "modal manusia" hasil sistem Barat untuk kepentingan nasional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bagi negara pascakolonial, prestasi internasional terkadang harus dibayar dengan pengakuan implisit terhadap superioritas pembinaan negara-negara pusat (Eropa), yang secara struktural tetap memegang kendali atas standar mutu sepak bola global (Erasmus University Rotterdam, the Netherlands, 2021).

#### **2.4. Relasi Sepak Bola Indonesia – Belanda dalam Kebijakan Naturalisasi**

Relasi antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) dalam periode terkini harus dipahami melalui kacamata formalitas hukum dan diplomasi publik yang berlapis. Secara konstitusional, kebijakan naturalisasi pemain tetap berpijak sepenuhnya pada supremasi hukum domestik, yakni Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, yang melibatkan mekanisme politik antara DPR dan Presiden. Dalam konteks ini, Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati oleh kedua federasi pada rentang 2023–2024 diposisikan sebagai bingkai struktural untuk mempererat kedekatan institusional, alih-alih sebuah kesepakatan tertulis mengenai distribusi atau pemasokan pemain naturalisasi secara spesifik. Implementasi kerja sama tersebut difokuskan pada akselerasi prestasi melalui transfer pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia. Ruang lingkup kemitraan ini mencakup pembenahan fundamental, mulai dari standarisasi pelatih, peningkatan kualitas wasit, hingga penguatan infrastruktur pembinaan usia dini dan sepak bola putri. Dengan menempatkan Belanda sebagai "mitra teknis" utama, Indonesia secara diskursif sedang menyerap metodologi dan sistem tata kelola sepak bola Eropa.

Namun, secara tekstual, dokumen kerja sama tersebut tidak mencantumkan klausul khusus mengenai perpindahan kewarganegaraan, melainkan lebih menekankan pada penyediaan keahlian (*expertise*) sebagai rujukan utama pembangunan sepak bola nasional. Meskipun jalur birokrasi menekankan pada aspek teknis edukatif, fakta sosiologis menunjukkan bahwa Belanda tetap menjadi

episentrum utama asal pemain diaspora yang memperkuat tim nasional Indonesia. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang relasi kolonial dan pascakolonial yang telah membentuk jaringan sosial serta ekosistem sepak bola yang unik di Belanda. Keberadaan komunitas diaspora Indonesia yang menetap di sana menciptakan ruang bagi lahirnya talenta-talenta yang ditempa dalam sistem pembinaan Belanda, namun memiliki ikatan primordial dengan Indonesia.

Secara hukum, proses alih kewarganegaraan ini tetap dikategorikan sebagai "naturalisasi istimewa" berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, yang didasarkan pada pertimbangan kontribusi terhadap kepentingan nasional. Dengan demikian, terdapat dualitas yang menarik untuk dikaji: di satu sisi, proses naturalisasi adalah tindakan kedaulatan hukum yang mandiri, namun di sisi lain, ia secara organik tumbuh subur di atas fondasi jaringan historis dan sosial antara mantan koloni dan metropol teoretisnya. Ketergantungan pada "produk" pembinaan Belanda ini mengonfirmasi bahwa meski secara administratif bersifat mandiri, secara substansial sepak bola Indonesia masih sangat terikat pada sistem yang dihasilkan oleh struktur relasi historis Belanda-Indonesia (Abdul Aziz Lutfi Akbar, 2025).